

Kebutuhan Sosial atau Kapasitas Fiskal? Systematic Review Determinan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

¹Pagiel T Simanungkalit, ²Syukriy Abdullah

^{1,2}Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

E-mail: ¹pagieljep@gmail.com, ²syukriyabdullah@feb.usk.ac.id

ABSTRAK

Belanja Bantuan Sosial (BBS) pemerintah daerah mencerminkan respons anggaran terhadap kebutuhan sosial, sementara kemampuan mengalokasikannya juga bergantung pada kapasitas fiskal. Penelitian ini mensintesis secara sistematis bukti empiris mengenai determinan BBS dari perspektif kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal. Artikel jurnal periode 2010-September 2026 ditelusuri melalui OpenAlex, GARUDA, penelusuran referensi, dan artikel yang telah dikumpulkan sebelumnya. Seleksi mengikuti PRISMA 2020 dan mutu metodologis dinilai per butir menggunakan MMAT 2018. Sebanyak 18 studi memenuhi kriteria akhir: 13 meneliti BBS/bantuan sosial secara langsung dan lima memberikan bukti pemerintah subnasional yang sebanding secara konseptual. Faktor fiskal jauh lebih sering diteliti dibandingkan kemiskinan dan pengangguran. Temuan PAD, kemandirian fiskal, transfer, dan surplus anggaran bersifat heterogen. Bukti kemiskinan masih terbatas, sedangkan pengangguran hampir belum diuji secara langsung. Penelitian berikutnya perlu menguji kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal secara bersama dengan ukuran pengeluaran, transfer, dan surplus yang lebih konsisten.

Kata kunci : *belanja bantuan sosial; kapasitas fiskal; kemiskinan; pemerintah daerah; pengangguran*

ABSTRACT

Local-government Social Assistance Expenditure (Belanja Bantuan Sosial/BBS) reflects a budgetary response to social needs, while the ability to allocate it also depends on fiscal capacity. This study systematically reviews empirical evidence on BBS determinants from social-needs and fiscal-capacity perspectives. Journal articles published in 2010-September 2026 were identified through OpenAlex, GARUDA, reference searching, and previously collected studies. Selection followed PRISMA 2020 and methodological quality was appraised item-by-item using MMAT 2018. Eighteen studies met the final criteria: 13 examined BBS/social assistance directly and five provided conceptually comparable subnational evidence. Fiscal factors were studied far more often than poverty and unemployment. Findings for own-source revenue, fiscal independence, transfers, and budget surpluses were heterogeneous. Poverty evidence remains limited, while unemployment was rarely examined directly. Future research should jointly test social needs and fiscal capacity using more consistent expenditure, transfer, and surplus measures.

Keyword : *fiscal capacity; local government; poverty; social assistance expenditure; unemployment*

1. PENDAHULUAN

Belanja Bantuan Sosial (BBS) merupakan salah satu instrumen pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi risiko sosial. Kebutuhan terhadap BBS dapat meningkat ketika masyarakat menghadapi keterbatasan ekonomi, terutama kemiskinan dan pengangguran. Namun, tingginya kebutuhan sosial tidak selalu langsung menghasilkan alokasi BBS yang lebih tinggi karena pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan sumber daya dan harus menentukan prioritas di antara berbagai kebutuhan belanja.

Pada sisi kebutuhan sosial, tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat menunjukkan besarnya kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan pendapatan dan kerentanan ekonomi. Secara konseptual, kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap intervensi pemerintah melalui bantuan sosial. Pada sisi lain, kemampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang dimiliki. Kapasitas tersebut dapat tercermin dari kemampuan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dukungan transfer pemerintah pusat, dan ketersediaan sumber pembiayaan dari surplus atau SiLPA tahun sebelumnya.

Hubungan antara kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal menjadi penting karena daerah dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi belum tentu mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi. Sebaliknya, pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal relatif besar juga belum tentu memberikan prioritas yang lebih besar kepada BBS. Dengan demikian, variasi BBS dapat dipahami melalui dua sisi yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu besarnya kebutuhan sosial yang perlu direspons dan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai respons tersebut.

Kerangka keuangan publik memberikan dasar konseptual bagi kedua sisi tersebut. Musgrave (1959) menempatkan distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah dalam mengatasi persoalan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Sementara itu, federalisme fiskal menjelaskan bahwa pemerintah yang berada lebih dekat dengan masyarakat memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi dan kondisi lokal sehingga dapat menyesuaikan pengeluaran publik dengan kebutuhan masyarakat (Oates, 1999). Namun, kemampuan memberikan respons tetap bergantung pada sumber daya fiskal yang tersedia.

Bukti empiris mengenai determinan BBS menunjukkan hasil yang tidak seragam. Fauzi et al. (2014), dalam konteks pemerintah kabupaten/kota di Aceh, melaporkan PAD berarah negatif, sedangkan DBH,

DAU, dan SiLPA berarah positif terhadap BBS berdasarkan persamaan dan pembahasan penelitian tersebut. Juniska et al. (2024) juga menemukan arah negatif PAD dalam konteks pemerintah daerah Sumatra Selatan, sementara pendapatan transfer dan SiLPA tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Sebaliknya, Lima dan Payamta (2026) menemukan bahwa kemandirian fiskal berhubungan positif dengan alokasi BBS pada pemerintah kabupaten di Indonesia.

Temuan mengenai transfer juga tidak menunjukkan pola tunggal. Beberapa penelitian memperoleh hubungan positif antara komponen transfer dan BBS, sementara penelitian lainnya tidak menemukan hubungan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan karakter transfer karena dana yang penggunaannya relatif fleksibel tidak memberikan ruang fiskal yang sama dengan dana yang telah ditentukan penggunaannya. Hal serupa terjadi pada SiLPA. Sebagian studi memperoleh hubungan positif dengan BBS, tetapi penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Dibandingkan kapasitas fiskal, bukti mengenai kebutuhan sosial masih jauh lebih terbatas. Kemiskinan telah digunakan dalam beberapa model empiris BBS, tetapi hasil yang tersedia belum memberikan pola yang konsisten. Pengangguran bahkan hampir tidak pernah ditempatkan sebagai determinan langsung BBS pemerintah daerah. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa literatur belum memberikan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.

Kajian ini berfokus pada Belanja Bantuan Sosial. Meskipun demikian, literatur internasional tidak selalu menggunakan nomenklatur BBS sebagaimana dalam konteks pemerintah daerah Indonesia. Sejumlah studi menggunakan social assistance expenditure, anti-poverty expenditure, welfare expenditure, atau social security expenditure. Studi tersebut dapat memberikan bukti yang relevan apabila outcome yang dianalisis secara konseptual berkaitan dengan pengeluaran pemerintah subnasional untuk merespons kerentanan sosial. Outcome yang lebih luas tersebut tidak dianggap identik dengan BBS, tetapi digunakan sebagai comparative evidence untuk memahami mekanisme hubungan kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal dengan pengeluaran bantuan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, systematic literature review ini bertujuan mengidentifikasi faktor kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal yang telah diuji sebagai determinan BBS atau pengeluaran bantuan sosial yang secara konseptual sebanding, membandingkan arah dan konsistensi hasil empiris, menjelaskan sumber heterogenitas temuan, dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih terdapat dalam literatur. Kajian ini secara khusus menjawab sejauh mana kemiskinan dan pengangguran telah diuji sebagai indikator kebutuhan sosial, bagaimana PAD atau kemandirian fiskal, transfer, dan SiLPA atau surplus berhubungan dengan BBS, serta sejauh mana bukti yang tersedia memungkinkan kedua perspektif tersebut dibandingkan secara terintegrasi.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Belanja Bantuan Sosial sebagai Keputusan Anggaran Pemerintah Daerah

BBS merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang diarahkan kepada masyarakat atau kelompok yang menghadapi risiko sosial. Dalam penelitian empiris pemerintah daerah Indonesia, BBS tidak selalu dioperasionalisasikan dengan cara yang sama. Sebagian penelitian menggunakan nominal BBS, sebagian menganalisis perubahan anggaran BBS, sedangkan penelitian lainnya menggunakan proporsi BBS terhadap keseluruhan pengeluaran.

Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap interpretasi hasil. Kenaikan nominal BBS tidak selalu menunjukkan meningkatnya prioritas bantuan sosial apabila keseluruhan belanja daerah meningkat lebih cepat. Perubahan BBS antara anggaran awal dan anggaran perubahan juga merepresentasikan proses yang berbeda dari penetapan alokasi pada awal tahun. Sementara itu, penggunaan proporsi BBS terhadap total belanja lebih dekat dengan konsep prioritas pengeluaran.

Dalam konteks internasional, terminologi pengeluaran sosial berbeda antarnegara. Social assistance expenditure, anti-poverty expenditure, social security expenditure, dan welfare expenditure dapat memiliki cakupan yang lebih luas daripada BBS Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini membedakan antara direct BBS evidence, yaitu studi yang secara langsung menggunakan BBS atau social assistance sebagai outcome, dan comparative evidence, yaitu studi dengan outcome yang lebih luas tetapi memiliki kedekatan konseptual dan mekanisme fiskal dengan bantuan kepada kelompok rentan. Pendekatan tersebut memungkinkan bukti internasional digunakan tanpa menyamakan struktur pengeluaran antarnegara.

2.2. Kebutuhan Sosial

Perspektif kebutuhan sosial memandang kondisi masyarakat sebagai salah satu dasar permintaan terhadap intervensi pemerintah. Kajian ini memberikan perhatian utama kepada kemiskinan dan pengangguran karena keduanya merepresentasikan tekanan ekonomi yang secara langsung berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh dan mempertahankan pendapatan.

Kemiskinan menunjukkan keterbatasan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Semakin besar kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, semakin besar pula kebutuhan potensial terhadap intervensi bantuan. Namun, hubungan antara kemiskinan dan alokasi BBS tidak harus selalu positif. Kebutuhan yang tinggi hanya dapat diterjemahkan menjadi pengeluaran ketika pemerintah memiliki ruang fiskal dan memilih memberikan prioritas pada bantuan sosial.

Pengangguran memiliki mekanisme yang serupa. Hilangnya pekerjaan atau tidak tersedianya kesempatan kerja mengurangi kemampuan memperoleh pendapatan dan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga. Karena itu, TPT dapat dipandang sebagai indikator tekanan kebutuhan sosial yang secara teoritis relevan terhadap BBS.

Dalam kerangka kajian ini, kemiskinan dan pengangguran berbeda secara konseptual dari variabel kapasitas fiskal. Keduanya menggambarkan kebutuhan yang perlu direspons, sedangkan PAD, transfer, dan SiLPA menggambarkan kemampuan pemerintah untuk merespons. Beberapa studi komparatif menggunakan indikator kebutuhan yang lebih luas, termasuk komposisi demografi. Bukti tersebut tetap dilaporkan sebagai pendukung, tetapi tidak diposisikan sebagai pengganti kemiskinan atau pengangguran dalam fokus utama kajian.

2.3. Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menyediakan sumber daya untuk membiayai pengeluaran. Dalam literatur yang ditinjau, kapasitas fiskal terutama terlihat melalui penerimaan daerah sendiri, transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, serta surplus atau sumber pembiayaan dari periode sebelumnya.

2.3.1. PAD dan Kemandirian Fiskal

PAD merupakan sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Secara sederhana, semakin besar PAD, semakin besar sumber daya yang tersedia untuk membiayai pengeluaran daerah. Namun, besarnya PAD secara nominal berbeda dengan kemandirian fiskal.

Kemandirian fiskal umumnya menggunakan ukuran relatif yang membandingkan PAD dengan keseluruhan pendapatan. Rasio tersebut memberikan informasi mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah bergantung pada sumber penerimaan sendiri. Oleh karena itu, PAD nominal dan kemandirian fiskal tidak seharusnya diperlakukan sebagai variabel yang identik.

2.3.2. Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antarpemerintah

Transfer merupakan mekanisme penting dalam hubungan fiskal antartingkat pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, transfer pemerintah pusat menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Namun, tidak semua transfer memiliki karakter yang sama. Transfer yang penggunaannya telah ditentukan untuk fungsi atau program tertentu memiliki tingkat diskresi yang berbeda dari transfer yang bersifat lebih umum.

Literatur internasional menggunakan istilah seperti *general grants*, *intergovernmental transfers*, atau *transfers from higher-level governments*. Terminologi tersebut tidak disamakan secara langsung dengan instrumen transfer Indonesia, tetapi memberikan *comparative evidence* mengenai bagaimana karakter dan tingkat fleksibilitas transfer dapat memengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah subnasional.

2.3.3. SiLPA dan Surplus Anggaran

SiLPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, tetapi pengukurannya dalam penelitian empiris tidak seragam. Sebagian studi menggunakan saldo SiLPA tahun sebelumnya, sebagian menggunakan perubahan SiLPA, *accumulated surplus*, atau ukuran SiLPA pada tahap penganggaran yang berbeda.

Saldo SiLPA menggambarkan sisa anggaran dari periode sebelumnya yang menjadi sumber penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan. Perubahan SiLPA maupun pengukuran SiLPA pada tahap anggaran yang berbeda dapat merepresentasikan kondisi fiskal yang tidak sama. Oleh karena itu, perbandingan antarstudi perlu memperhatikan tahun asal SiLPA dan tahap penganggaran ketika variabel tersebut diukur. Kajian ini tidak membedakan SiLPA berdasarkan tingkat keterikatan penggunaannya karena informasi tersebut tidak tersedia secara konsisten pada studi yang ditelaah.

3. METODOLOGI

3.1. Desain Review

Penelitian ini menggunakan *systematic literature review* (SLR) dengan sintesis tematik. PRISMA 2020 digunakan sebagai pedoman pelaporan proses identifikasi, screening, eligibility, dan inklusi studi (Page et al., 2021). PRISMA digunakan untuk meningkatkan transparansi proses seleksi dan bukan sebagai instrumen untuk memberikan skor kualitas artikel.

Karena studi yang diperoleh memiliki heterogenitas dalam outcome, pengukuran determinan, tingkat pemerintahan, periode pengamatan, dan teknik estimasi, hasil tidak digabungkan melalui meta-analisis. Sintesis dilakukan secara naratif dengan mengadaptasi prinsip *thematic synthesis* untuk mengelompokkan dan membandingkan bukti lintas studi (Thomas & Harden, 2008).

3.2. Sumber Informasi dan Strategi Pencarian

Pencarian utama dilakukan melalui OpenAlex dan dilengkapi dengan penelusuran GARUDA, daftar referensi, serta artikel atau PDF yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pencarian langsung melalui Scopus tidak dimasukkan karena akses yang diperlukan untuk melakukan pencarian dan ekspor secara reproduktif tidak tersedia.

Periode publikasi dibatasi pada tahun 2010 sampai September 2026. Pencarian OpenAlex menggunakan kelompok istilah outcome dan pemerintah subnasional secara luas agar studi tidak terlewat hanya karena tidak mencantumkan determinan tertentu dalam judul atau abstrak. Kelompok istilah outcome mencakup *social spending*, *social expenditure*, *social protection*, *social assistance*, *social security*, *anti-poverty expenditure*, *welfare expenditure*, dan *welfare budget*. Kelompok konteks mencakup *local government*, *municipal*, *district*, *county*, *subnational*, *regional*, *province*, dan *local authority*.

Istilah determinan seperti kemiskinan, pengangguran, PAD, transfer, dan SiLPA tidak diwajibkan dalam pencarian utama OpenAlex karena penggunaan seluruh determinan dalam satu query berpotensi mengeluarkan studi relevan yang menggunakan istilah berbeda. Determinan diperiksa pada tahap screening dan full-text eligibility.

Penelusuran GARUDA menggunakan beberapa kombinasi istilah yang lebih spesifik terhadap konteks Indonesia, antara lain “belanja bantuan sosial” dan “pemerintah daerah”; “belanja bantuan sosial” dengan PAD dan SiLPA; “belanja bantuan sosial” dengan Dana

Alokasi Umum; “belanja bantuan sosial” dengan dana perimbangan; serta kombinasi kemiskinan, fiscal independence, fiscal stress, otonomi keuangan, surplus, dan BBS. Catatan per kueri dan tanggal untuk seluruh pencarian GARUDA tidak tersimpan secara lengkap. Oleh karena itu, angka GARUDA yang dilaporkan adalah jumlah record yang secara konkret berhasil diperoleh dan disaring, bukan klaim mengenai keseluruhan jumlah hasil native dalam mesin pencari GARUDA.

3.3. Kriteria Kelayakan

Studi dimasukkan apabila unit analisis berupa pemerintah subnasional, seperti provinsi, negara bagian, kabupaten, kota, county, municipality, atau bentuk pemerintahan lokal lain. BBS atau bentuk pengeluaran sosial yang secara konseptual dekat dengan bantuan kepada kelompok rentan harus menjadi outcome atau memiliki persamaan outcome yang dapat diekstrak. Studi juga harus menguji sekurangnya satu indikator kebutuhan sosial atau kapasitas fiskal secara empiris.

Outcome utama kajian adalah BBS. Namun, studi dengan social assistance expenditure, anti-poverty expenditure, welfare expenditure, atau social security expenditure dapat dipertahankan sebagai comparative evidence apabila terdapat kedekatan konseptual dan metodologis dengan mekanisme bantuan pemerintah subnasional. Outcome tersebut tidak dianggap identik dengan BBS dalam APBD Indonesia. Setiap hasil tetap diinterpretasikan menurut definisi asli, konteks kelembagaan, dan pengukuran masing-masing penelitian.

Artikel dikeluarkan apabila BBS atau pengeluaran sosial hanya menjadi variabel independen untuk menjelaskan outcome lain tanpa adanya persamaan belanja yang relevan; unit analisis tidak berada pada pemerintah subnasional; hasil determinan terhadap pengeluaran tidak dapat diekstrak; artikel bukan publikasi jurnal; naskah lengkap tidak dapat diperiksa secara memadai; atau naskah tidak tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Dua studi Rizqiyati dan Setiawan (2021, 2022), yang tujuan utamanya berkaitan dengan siklus anggaran pemilu, tetap dipertahankan karena model mereka memberikan hasil empiris untuk BBS dan beberapa determinan yang relevan. Interpretasi dalam SLR ini dibatasi pada koefisien kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal, bukan pada unsur politiknya. Ramadani dan

Rochmatullah (2024) juga dipertahankan karena meskipun BBS berfungsi sebagai mediator dalam model keseluruhan, penelitian tersebut mengestimasi persamaan penentu BBS yang dapat diekstrak.

3.4. Seleksi Studi

Screening dilakukan secara bertahap pada judul, abstrak, dan naskah lengkap. Pada tahap judul, record dikeluarkan apabila secara jelas tidak menggunakan konteks pemerintah subnasional atau tidak berkaitan dengan pengeluaran yang relevan. Screening abstrak memeriksa arah hubungan, jenis outcome, determinan, dan jenis penelitian. Full text kemudian digunakan untuk memastikan definisi variabel, unit analisis, sampel, metode, serta hasil yang dapat diekstrak.

Penelusuran OpenAlex menghasilkan 589 record. Sebanyak 14 duplikasi judul dihapus sehingga 575 record memasuki screening judul. Sebanyak 492 record dikeluarkan dan 83 melanjutkan ke screening abstrak. Satu tambahan duplikasi variasi judul ditemukan sehingga 82 abstrak unik dinilai. Dari jumlah tersebut, 31 dikeluarkan dan dua dipertahankan hanya sebagai supporting literature, sehingga 49 laporan dicari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Satu laporan tidak dapat diperoleh dengan informasi yang memadai sehingga 48 laporan dapat dinilai. Delapan laporan dikeluarkan berdasarkan kriteria substantif dan satu dipertahankan sebagai supporting literature, sehingga 39 studi memenuhi kelayakan substantif awal. Setelah kriteria akses naskah penuh dan bahasa diterapkan, lima studi OpenAlex dipertahankan.

Penelusuran GARUDA menghasilkan 20 record yang berhasil diperoleh dan disaring. Satu record merupakan duplikasi dengan OpenAlex sehingga tersisa 19 record unik. Delapan record dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria substantif, sedangkan satu artikel tidak dapat diperiksa secara memadai karena naskah lengkap tidak berhasil diperoleh. Sepuluh studi GARUDA dipertahankan. Selain itu, sepuluh artikel unik berasal dari penelusuran referensi dan koleksi artikel sebelumnya. Setelah tujuh studi dikeluarkan berdasarkan kriteria akses, bahasa, atau kelayakan, tiga studi dipertahankan. Dengan demikian, korpus akhir terdiri atas 18 studi, yaitu lima studi dari OpenAlex, sepuluh dari GARUDA, dan tiga melalui metode penelusuran tambahan.

Tabel 1. Jejak Audit Seleksi Studi

Source	Selection stage	Number
OpenAlex	Records identified	589
OpenAlex	Duplicates removed	14
OpenAlex	Title-screened	575
OpenAlex	Excluded at title screening	492
OpenAlex	Entering abstract screening	83
OpenAlex	Additional duplicate	1
OpenAlex	Unique abstracts screened	82
OpenAlex	Reports sought for further assessment	49
OpenAlex	Reports assessed	48
OpenAlex	Substantively eligible before access/language filter	39
OpenAlex	Final studies	5
GARUDA	Records retrieved and screened	20

Source	Selection stage	Number
GARUDA	Cross-source duplicate	1
GARUDA	Unique records	19
GARUDA	Substantively excluded	8
GARUDA	Full text not sufficiently retrieved	1
GARUDA	Final studies	10
Other methods	Unique candidate studies	10
Other methods	Final studies	3
Total	Studies included in synthesis	18

Sumber: diolah penulis (2026).

3.5. Ekstraksi Data dan Pengodean Tematik

Data extraction mencakup penulis, tahun publikasi, negara atau wilayah, unit analisis, definisi outcome, indikator kebutuhan sosial, indikator kapasitas fiskal, metode, arah hubungan, signifikansi statistik, dan keterbatasan interpretasi.

Tiga belas dari 18 studi menggunakan BBS atau ukuran social assistance secara langsung sebagai outcome. Lima studi menggunakan outcome yang lebih luas tetapi relevan secara konseptual dan diklasifikasikan sebagai comparative evidence. Perbedaan ini dipertahankan sepanjang sintesis.

Pengodean tematik terdiri atas dua domain utama. Pertama, kebutuhan sosial, terutama kemiskinan dan pengangguran, dengan indikator kebutuhan demografis yang lebih luas hanya sebagai bukti pendukung. Kedua, kapasitas fiskal, yang dibagi menjadi pendapatan sendiri atau kemandirian fiskal, transfer, serta SiLPA atau surplus anggaran. Studi dapat dikodekan pada kedua domain apabila memuat variabel relevan dari keduanya.

3.6. Penilaian Kualitas Metodologis

Mutu metodologis dinilai menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) 2018 (Hong et al., 2018). Mayoritas studi merupakan quantitative non-randomized studies sehingga digunakan dua pertanyaan screening dan lima kriteria MMAT untuk desain tersebut.

Setiap butir dicatat sebagai Yes (Y), No (N), atau Can't Tell (CT). Tidak dibuat skor numerik agregat karena penilaian ditujukan untuk mengidentifikasi keterbatasan metodologis spesifik, bukan memberi peringkat studi. Tidak ada studi yang dikeluarkan hanya karena satu butir MMAT dinilai No atau Can't Tell.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Studi Terinklusi

Korpus akhir terdiri atas 18 studi. Empat belas penelitian dilakukan di Indonesia, sedangkan empat menggunakan konteks internasional, termasuk Spanyol, China, dan Brasil. Tiga belas studi secara langsung meneliti BBS atau social assistance, sedangkan lima dipertahankan sebagai comparative evidence karena meneliti pengeluaran pemerintah subnasional yang relevan secara konseptual.

Secara tematik, 14 studi menguji faktor fiskal saja, satu menguji faktor kebutuhan sosial saja, dan tiga memuat bukti dari kedua domain. Dengan demikian, 17 dari 18 studi mengandung bukti kapasitas fiskal, sedangkan hanya empat yang mengandung bukti kebutuhan sosial. Distribusi tersebut menunjukkan ketimpangan perhatian penelitian, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa kapasitas fiskal mempunyai pengaruh kausal yang lebih kuat.

Tabel 2. Karakteristik dan Temuan Utama Studi Terinklusi

Study	Context and outcome	Evidence/domain	Main finding used in synthesis
Herrero-Alcalde & Tránchez-Martin (2017)	Spain; regional social expenditure	Comparative; needs & fiscal	Demographic, financial, and institutional characteristics are associated with regional social expenditure.
Shen & Wu (2018)	China; social security expenditure	Comparative; needs	Demographic structure, particularly population ageing, is positively related to expenditure.
Rafli & Sari (2021)	Sumatra; change in BBS	Direct BBS; fiscal	SiLPA is positive; PAD and fiscal stress are not significant.
Zheng et al. (2023)	China; anti-poverty/minimum-living-security expenditure	Comparative; fiscal	Transfers increase expenditure in urban counties; results differ in rural areas.
Venni & Abbas (2026)	Indonesia; welfare spending	Comparative; fiscal	Fiscal decentralization is positively associated with welfare spending.
Fauzi et al. (2014)	Aceh; BBS	Direct BBS; fiscal	PAD negative; DBH, DAU, and SiLPA positive by equation/discussion; partial significance reporting is limited.
Amran et al. (2015)	Aceh; change in BBS	Direct BBS; fiscal	Changes in PAD, DBH, and SiLPA are reported as related to changes in BBS.
Rizqiyati & Setiawan (2021)	Java; BBS equation within election-budget study	Direct BBS; needs & fiscal	Poverty and transfer variables provide supplementary evidence; primary objective differs.
Sari et al. (2022)	Sumatra; change in BBS	Direct BBS; fiscal	Fiscal stress is associated with changes in BBS; moderation evidence is limited.
Putra & Arza (2023)	Sumatra; BBS budget change	Direct BBS; fiscal	Financial autonomy, accumulated surplus, and SiLPA are reported positive; reporting inconsistencies require caution.
Ramadani & Rochmatullah (2024)	Java; BBS equation as mediator	Direct BBS; fiscal	PAD is significant; DAU and DAK are not significant in the BBS equation.

Study	Context and outcome	Evidence/domain	Main finding used in synthesis
Juniska et al. (2024)	South Sumatra; BBS	Direct BBS; fiscal	PAD negative; aggregate transfer revenue and SiLPA are not significant.
Utami & Wibowo (2025)	Central Java & DIY; change in BBS	Direct BBS; fiscal	Financial autonomy and SiLPA are not significant; accumulated surplus is significant.
Gunawan et al. (2025)	Sumatra provinces; BBS	Direct BBS; fiscal	PAD and balancing funds are positive; P-SiLPA is not significant.
Lima & Payamta (2026)	Indonesia; BBS allocation share	Direct BBS; fiscal	Fiscal independence is positively associated with BBS allocation.
Sousa & Monte (2021)	Brazil; composition of social functions	Comparative; fiscal	Own-tax share and transfers per capita show different relationships with social expenditure composition.
Wibisono et al. (2021)	Madiun; BBS	Direct BBS; fiscal	PAD, DBH, and DAU are significant; SiLPA is not significant.
Rizqiyati & Setiawan (2022)	Indonesia; BBS equation within election study	Direct BBS; needs & fiscal	Poverty and transfers are not significant in the BBS model; PAD/size variables show positive associations.

Sumber: diolah penulis berdasarkan studi terinklusi (2026).

Keragaman outcome pada Table 2 merupakan bagian penting dalam interpretasi. Koefisien pada social security expenditure tidak dapat langsung dibaca sebagai efek yang akan terjadi pada BBS Indonesia. Studi komparatif digunakan untuk memahami mekanisme, bukan sebagai estimasi langsung determinan BBS Indonesia.

4.2. Kebutuhan Sosial: Kemiskinan dan Pengangguran

Bukti mengenai kebutuhan sosial jauh lebih tipis dibandingkan bukti kapasitas fiskal. Hanya empat dari 18 studi yang memuat variabel pada domain kebutuhan, dan tidak semuanya secara langsung menguji kemiskinan atau pengangguran.

Bukti yang paling langsung mengenai kemiskinan berasal dari penelitian BBS Indonesia. Rizqiyati dan Setiawan (2022) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kemiskinan dan BBS dalam model mereka. Studi sebelumnya oleh penulis yang sama juga memasukkan variabel kebutuhan, tetapi karena tujuan utama penelitian berkaitan dengan perilaku anggaran pemilu, hasilnya diperlakukan hanya sebagai bukti tambahan mengenai determinan BBS.

Temuan tersebut tidak menunjukkan bahwa kemiskinan secara umum tidak berhubungan dengan BBS. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa model empiris yang tersedia masih terbatas dan belum menunjukkan respons positif BBS terhadap kemiskinan secara konsisten.

Studi komparatif internasional memberikan bukti yang lebih luas bahwa karakteristik kebutuhan masyarakat dapat berkaitan dengan pengeluaran pemerintah subnasional. Herrero-Alcalde dan Tránchez-Martín (2017) menemukan bahwa faktor demografi bersama kondisi keuangan dan kelembagaan relevan terhadap social expenditure regional di Spanyol. Shen dan Wu (2018) menemukan hubungan antara struktur demografi dan social security expenditure provinsi di China. Kedua studi tersebut mendukung proposisi umum bahwa pengeluaran dapat merespons kebutuhan penduduk, tetapi tidak merupakan bukti langsung bahwa kemiskinan atau TPT meningkatkan BBS kabupaten/kota Indonesia.

Kesenjangan yang lebih besar terdapat pada pengangguran. Tidak ada bukti kuat dalam 18 studi yang menempatkan pengangguran atau TPT sebagai determinan langsung BBS pemerintah daerah. Ramadani

dan Rochmatullah (2024) memasukkan pengangguran dalam model yang lebih luas, tetapi pengangguran merupakan outcome yang dipengaruhi melalui BBS, bukan penentu BBS. Karena itu, kesimpulan yang paling defensibel bukan bahwa pengangguran tidak berhubungan dengan BBS, melainkan bahwa hubungan tersebut hampir belum diuji secara langsung.

4.3. PAD dan Kemandirian Fiskal

Bukti mengenai PAD dan kemandirian fiskal lebih berkembang, tetapi juga lebih heterogen. Fauzi et al. (2014) melaporkan arah negatif PAD terhadap BBS di Aceh. Juniska et al. (2024) memperoleh arah negatif dalam konteks Sumatra Selatan. Sebaliknya, Gunawan et al. (2025) memperoleh hubungan positif antara PAD dan BBS pada pemerintah provinsi di Sumatra.

Rafli dan Sari (2021) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara PAD dan perubahan BBS. Variasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pendapatan sendiri yang lebih besar tidak otomatis diterjemahkan menjadi belanja bantuan sosial yang lebih besar.

Bukti berdasarkan rasio kemandirian fiskal juga beragam. Lima dan Payamta (2026) menemukan hubungan positif antara kemandirian fiskal dan proporsi alokasi BBS. Putra dan Arza (2023) melaporkan hubungan positif antara otonomi keuangan dan perubahan BBS, tetapi beberapa inkonsistensi pelaporan statistik memerlukan kehati-hatian. Utami dan Wibowo (2025), menggunakan sampel dan periode berbeda, tidak menemukan otonomi keuangan signifikan.

Salah satu penjelasan atas perbedaan tersebut adalah pengukuran. PAD nominal mengukur besarnya penerimaan sendiri, sedangkan kemandirian fiskal mengukur posisi PAD dalam struktur pendapatan yang lebih luas. Sumber variasi kedua adalah outcome: nominal BBS, perubahan BBS, dan proporsi BBS menjawab pertanyaan yang berbeda. Bukti komparatif dari Brasil juga menunjukkan bahwa rasio pajak sendiri dan transfer per kapita dapat memiliki pola hubungan yang berbeda dengan komposisi pengeluaran sosial (Sousa & Monte, 2021). Dengan demikian, literatur tidak mendukung satu arah universal antara kapasitas fiskal sendiri dan BBS.

4.4. Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antarpemerintah

Transfer merupakan salah satu tema fiskal paling penting dalam literatur. Dalam konteks Indonesia, Fauzi

et al. (2014) melaporkan arah positif DBH dan DAU terhadap BBS. Gunawan et al. (2025) menemukan hubungan positif dana perimbangan dengan BBS. Wibisono et al. (2021) juga melaporkan hubungan signifikan yang melibatkan DBH dan DAU.

Namun, penelitian lain tidak memperoleh hasil yang sama. Juniska et al. (2024) menemukan pendapatan transfer agregat tidak signifikan. Ramadani dan Rochmatullah (2024) melaporkan DAU dan DAK tidak signifikan dalam persamaan BBS. Rizqiyati dan Setiawan (2022) juga tidak menemukan koefisien transfer yang signifikan terhadap BBS.

Perbedaan tersebut dapat berasal dari agregasi. Variabel total transfer dapat menggabungkan sumber dana dengan tingkat diskresi yang sangat berbeda. Transfer yang earmarked untuk layanan tertentu tidak memberikan fleksibilitas yang sama dengan transfer umum. Comparative evidence mendukung pentingnya desain transfer. Zheng et al. (2023) menemukan bahwa sumber fiskal dan transfer berkaitan dengan anti-poverty expenditure pada county urban di China, sementara hasil berbeda di wilayah rural. Sousa dan Monte (2021) menunjukkan transfer per kapita memiliki hubungan dengan komposisi pengeluaran yang berbeda dari sumber pajak lokal.

Dengan demikian, persoalan tidak hanya terletak pada besarnya transfer yang diterima daerah, tetapi juga pada jenis transfer dan diskresi penggunaannya. Analisis masa depan perlu membedakan transfer yang relatif umum atau non-earmarked dari transfer yang terikat tujuan tertentu agar pengukuran kapasitas fiskal lebih tepat.

4.5. SiLPA, Surplus Anggaran, dan Penyesuaian Anggaran

SiLPA merupakan variabel fiskal yang cukup sering diteliti dalam literatur BBS Indonesia, tetapi hasilnya

tidak konsisten. Rafli dan Sari (2021) menemukan hubungan positif antara SiLPA dan perubahan BBS. Fauzi et al. (2014) juga melaporkan arah positif. Putra dan Arza (2023) melaporkan hubungan positif yang melibatkan accumulated surplus dan SiLPA, sementara Amran et al. (2015) meneliti perubahan SiLPA dalam hubungannya dengan perubahan BBS.

Sebaliknya, Juniska et al. (2024), Gunawan et al. (2025), Wibisono et al. (2021), dan Utami dan Wibowo (2025) tidak menemukan pengaruh signifikan untuk ukuran SiLPA yang mereka gunakan. Utami dan Wibowo (2025) memberikan perbedaan penting karena accumulated surplus signifikan ketika ukuran SiLPA lainnya tidak signifikan.

SiLPA tahun sebelumnya menggambarkan sisa anggaran yang menjadi sumber penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan. Namun, literatur menggunakan ukuran dan waktu pengamatan yang berbeda, seperti saldo SiLPA tahun sebelumnya, perubahan SiLPA, accumulated surplus, dan SiLPA yang diamati pada tahap anggaran yang berbeda. Karena itu, hasil antartstudi tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan yang perlu ditekankan terutama adalah definisi, tahun asal SiLPA, dan tahap penganggaran ketika variabel tersebut diukur, bukan keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan SiLPA.

4.6. Kualitas Metodologi Bukti

Penilaian MMAT menunjukkan bahwa pertanyaan penelitian dan strategi pengukuran dasar umumnya dapat diidentifikasi pada studi yang disertakan. Keterbatasan yang relatif lebih sering muncul berkaitan dengan representativitas sampel, kelengkapan informasi outcome, dan pengendalian faktor perancu.

Tabel 3. Penilaian MMAT per Butir

Study	S1	S2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
Herrero-Alcalde & Tránchez-Martín	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Shen & Wu	Y	Y	Y	Y	CT	CT	Y
Rafli & Sari	Y	Y	N	Y	CT	Y	Y
Zheng et al.	Y	Y	Y	Y	CT	Y	Y
Venni & Abbas	Y	Y	CT	Y	Y	Y	Y
Fauzi et al.	Y	Y	Y	Y	CT	N	Y
Amran et al.	Y	Y	Y	Y	CT	N	Y
Rizqiyati & Setiawan (2021)	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Y
Sari et al.	Y	Y	CT	Y	CT	CT	Y
Putra & Arza	Y	Y	CT	Y	CT	N	Y
Ramadani & Rochmatullah	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Y
Juniska et al.	Y	Y	Y	Y	CT	N	Y
Utami & Wibowo	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Y
Gunawan et al.	Y	Y	Y	Y	CT	N	Y
Lima & Payamta	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Y
Sousa & Monte	Y	Y	Y	Y	CT	Y	Y
Wibisono et al.	Y	Y	Y	Y	CT	N	Y
Rizqiyati & Setiawan (2022)	Y	Y	CT	Y	CT	Y	Y

Catatan: S1-S2 = pertanyaan screening; 3.1 = representativitas; 3.2 = ketepatan pengukuran; 3.3 = kelengkapan data outcome; 3.4 = pengendalian faktor perancu; 3.5 = ketepatan pengukuran exposure/intervention. Y = Yes; N = No; CT = Can't Tell. Tidak dihitung skor kualitas agregat.

Dua studi memerlukan perhatian khusus. Fauzi et al. (2014) memiliki perbedaan penyajian tanda koefisien antarbagian artikel, sedangkan persamaan regresi, abstrak Indonesia, dan pembahasan menunjukkan arah PAD

negatif serta DBH, DAU, dan SiLPA positif. Pelaporan signifikansi parsialnya tidak cukup jelas untuk mendukung klaim kuat terhadap setiap koefisien.

Putra dan Arza (2023) juga memiliki beberapa inkonsistensi antara narasi statistik dan nilai probabilitas yang dilaporkan. Studi tersebut tetap relevan bagi sintesis, tetapi hasilnya ditafsirkan dengan kehati-hatian lebih besar. Keterbatasan ini memperlihatkan bahwa SLR tidak cukup hanya menghitung berapa banyak studi yang melaporkan koefisien positif atau signifikan; kualitas dan kejelasan bukti juga perlu dipertimbangkan.

4.7. Sintesis Integratif: Kebutuhan Sosial versus Kapasitas Fiskal

Hasil utama kajian adalah adanya ketimpangan antara dua domain. Kapasitas fiskal muncul pada 17 dari 18 studi, sedangkan variabel kebutuhan hanya muncul pada empat studi. Distribusi tersebut menggambarkan apa yang lebih sering dipelajari dalam literatur, bukan domain mana yang mempunyai efek lebih besar.

Bukti yang tersedia tidak mendukung kesimpulan bahwa kapasitas fiskal secara inheren lebih penting daripada kebutuhan sosial dalam menentukan BBS. Kesimpulan semacam itu memerlukan penelitian yang mengukur kedua kelompok faktor secara konsisten dalam kerangka empiris yang sama.

Sebaliknya, literatur lebih mendukung pemahaman bahwa kedua domain bersifat saling melengkapi. Kebutuhan sosial menggambarkan tekanan untuk melakukan respons pemerintah, sedangkan kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan untuk membiayai respons tersebut. Daerah dapat memiliki kemiskinan atau pengangguran tinggi tetapi kapasitas fiskal terbatas, sehingga kebutuhan yang tinggi tidak otomatis diterjemahkan menjadi BBS yang tinggi. Sebaliknya, daerah yang kuat secara fiskal tetap dapat memberikan proporsi rendah pada BBS karena sumber daya bersaing dengan prioritas belanja lainnya.

Sintesis juga menunjukkan tiga sumber utama heterogenitas empiris. Pertama, outcome berbeda: nominal BBS, perubahan BBS, proporsi BBS, anti-poverty expenditure, social security expenditure, dan welfare spending tidak mengukur keputusan fiskal yang sama. Kedua, ukuran fiskal berbeda: PAD tidak identik dengan kemandirian fiskal; transfer agregat tidak identik dengan general atau discretionary transfers; dan studi SiLPA menggunakan definisi yang berbeda, seperti saldo SiLPA tahun sebelumnya, perubahan SiLPA, atau accumulated surplus. Ketiga, waktu pengukuran berbeda: anggaran awal, anggaran perubahan, realisasi, dan saldo tahun sebelumnya mewakili tahap keputusan yang berbeda. Perbedaan tersebut membantu menjelaskan mengapa koefisien yang tampak bertentangan tidak selalu merepresentasikan perilaku ekonomi yang benar-benar bertentangan.

4.8. Kesenjangan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang

Kesenjangan pertama terdapat pada kebutuhan sosial. Kemiskinan masih memperoleh pengujian langsung yang terbatas sebagai determinan BBS lokal, sedangkan pengangguran hampir belum diteliti. Ketimpangan ini penting karena keduanya menyediakan informasi langsung mengenai kerentanan ekonomi masyarakat.

Kesenjangan kedua adalah terbatasnya integrasi kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal dalam satu model. Sebagian besar literatur Indonesia memusatkan perhatian pada PAD, transfer, SiLPA, fiscal stress, atau otonomi keuangan tanpa secara bersamaan memodelkan kondisi sosial yang berpotensi menciptakan kebutuhan terhadap BBS.

Kesenjangan ketiga berkaitan dengan pengukuran transfer. Sejumlah penelitian menggunakan transfer agregat meskipun instrumen transfer berbeda secara substansial dalam tingkat diskresi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Penelitian mendatang perlu membedakan transfer yang relatif fleksibel atau umum dari transfer earmarked atau bertujuan khusus.

Kesenjangan keempat berkaitan dengan pengukuran SiLPA. Literatur menggunakan beberapa ukuran yang berbeda, seperti saldo SiLPA tahun sebelumnya, perubahan SiLPA, accumulated surplus, dan SiLPA pada tahap penganggaran yang berbeda. Perbedaan definisi dan waktu pengukuran tersebut menyebabkan hasil antarpelitian tidak sepenuhnya dapat dibandingkan. Penelitian berikutnya perlu menetapkan ukuran SiLPA secara konsisten, termasuk tahun asal SiLPA dan tahap penganggaran ketika variabel tersebut digunakan.

Kesenjangan kelima berkaitan dengan pengukuran BBS. Belanja nominal dan perubahan anggaran tidak secara langsung mengukur prioritas belanja. Ketika pertanyaan penelitian berkaitan dengan prioritas bantuan sosial, ukuran relatif dapat memberikan perspektif berbeda dari belanja nominal. Penelitian empiris berikutnya dapat berkontribusi dengan mengestimasi variabel kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal secara bersama, menyelaraskan waktu indikator sosial dengan proses penganggaran, membedakan jenis transfer, menetapkan definisi serta waktu pengukuran SiLPA secara konsisten, dan memilih outcome sesuai apakah pertanyaan penelitian berkaitan dengan level pengeluaran, penyesuaian anggaran, atau prioritas alokasi.

5. KESIMPULAN

Systematic literature review ini mensintesis 18 studi empiris mengenai determinan BBS pemerintah daerah dan pengeluaran bantuan sosial yang sebanding secara konseptual. Tiga belas studi secara langsung meneliti BBS atau social assistance, sedangkan lima memberikan comparative evidence dari outcome pengeluaran subnasional yang lebih luas.

Literatur sangat terkonsentrasi pada kapasitas fiskal. PAD, kemandirian fiskal, transfer, SiLPA, dan indikator fiskal lainnya jauh lebih sering diteliti dibandingkan kemiskinan dan pengangguran. Namun, frekuensi penelitian yang lebih besar tidak membuktikan bahwa kapasitas fiskal mempunyai pengaruh kausal yang lebih kuat terhadap BBS.

Bukti mengenai kapasitas fiskal sendiri bersifat heterogen. PAD dilaporkan memiliki hubungan negatif, positif, maupun tidak signifikan, sementara ukuran kemandirian fiskal juga berubah menurut sampel dan spesifikasi. Perbedaan tersebut sebagian berasal dari fakta

bahwa PAD nominal dan kemandirian fiskal mengukur dimensi kapasitas yang berbeda.

Bukti transfer juga heterogen. Sebagian studi menunjukkan hubungan positif, sedangkan penelitian lain tidak menemukan hasil signifikan. Sintesis menunjukkan bahwa desain transfer penting karena transfer agregat dapat menggabungkan sumber yang mempunyai tingkat diskresi belanja berbeda. Temuan SiLPA dan surplus juga tidak konsisten, antara lain karena studi menggunakan definisi dan waktu pengukuran yang berbeda, seperti saldo SiLPA tahun sebelumnya, perubahan SiLPA, accumulated surplus, dan SiLPA yang diamati pada tahap penganggaran yang berbeda.

Kesenjangan terpenting terdapat pada sisi kebutuhan sosial. Bukti kemiskinan masih terbatas dan pengangguran hampir belum diuji secara langsung sebagai determinan BBS lokal. Akibatnya, literatur yang ada belum dapat menjawab secara meyakinkan apakah prioritas BBS terutama berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, kapasitas fiskal pemerintah daerah, atau interaksi keduanya.

Kontribusi kajian ini bukan menentukan satu perspektif lebih penting daripada yang lain, tetapi menunjukkan bahwa literatur yang tersedia tidak seimbang secara substantif dan heterogen secara metodologis. Penelitian masa depan perlu mengintegrasikan kebutuhan sosial dan kapasitas fiskal dalam kerangka empiris yang sama serta menggunakan definisi BBS, diskresi transfer, dan pengukuran SiLPA tahun sebelumnya yang lebih konsisten dan presisi.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pencarian basis data utama menggunakan OpenAlex dan dilengkapi GARUDA serta metode lain tanpa pencarian langsung Scopus yang reproduktif. Kajian dibatasi pada studi full text berbahasa Indonesia atau Inggris. Log pencarian setiap kueri GARUDA juga tidak seluruhnya tersimpan. Selain itu, lima studi menggunakan outcome yang lebih luas daripada BBS Indonesia; studi tersebut dipertahankan sebagai comparative evidence karena relevansi konseptual dan metodologisnya, tetapi temuannya tidak diperlakukan sebagai outcome yang identik dengan BBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Darwanis, & Abdullah, S. (2015). Pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Magister Akuntansi*, 4(1), 1-10.
- Fauzi, T., Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 7(2), 76-92.
- Gunawan, H., Sandrayati, & Armaini, R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan P-SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Permana*, 17(3), 1196-1211. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1049>
- Herrero-Alcalde, A., & Tránchez-Martín, J. M. (2017). Demographic, political, institutional and financial determinants of regional social expenditure: The case of Spain. *Regional Studies*, 51(6), 920-932. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1146822>
- Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., et al. (2018). *Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)*, version 2018: User guide. McGill University.
- Juniska, A., Hartati, S., & Mubarak, M. H. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 8(1), 238-244. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11354474>
- Lima, W. H., & Payamta. (2026). The efficiency paradox: When financial efficiency reduces social assistance allocation in Indonesian local governments. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 12(1), 89-103. <https://doi.org/10.28986/jtken.v12i1.2565>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Putra, R. D., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh otonomi keuangan, akumulasi surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 936-951. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.734>
- Rafli, M. N., & Sari, V. F. (2021). Pengaruh PAD, SiLPA, dan fiscal stress terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 486-500. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.384>
- Ramadani, H. A., & Rochmatullah, M. R. (2024). Analisis dampak pendapatan daerah terhadap kemiskinan dan pengangguran dengan Belanja Bantuan Sosial sebagai pemediasi. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 20(1), 14-30. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v20i1.2206>
- Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2021). Political budget cycle on the regional elections in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 13(1), 85-98. <https://doi.org/10.17509/jaset.v13i1.33879>
- Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2022). Do regional heads utilize capital expenditures, grants, and social assistance in the context of elections? *Economics*, 10(9), 220. <https://doi.org/10.3390/economics10090220>
- Sari, N., Abdullah, S., & Maryasih, L. (2022). The effect of fiscal stress on changes in social aid shopping with legislative size as moderating. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 269-280. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.19823>
- Shen, S., & Wu, Y. (2018). The influence of China demographic structure on social security expenditure-Based on panel data model. *Open Journal of Statistics*, 8, 556-561. <https://doi.org/10.4236/ojs.2018.83036>
- Sousa, K. M., & Monte, P. A. (2021). Public expenditure composition and fiscal decentralization in Brazilian local governments: An analysis through unconditional quantile regression with longitudinal data. *Revista de Administração Pública*, 55(6), 1333-1354. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200864>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Utami, N. D., & Wibowo, R. Y. C. (2025). Determinan yang memengaruhi perubahan anggaran bantuan sosial. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(8), 1128-1139. <https://doi.org/10.24843/EEB.2025.v14.i08.p04>
- Venni, R., & Abbas, Y. (2026). Fiscal decentralization and welfare spending in Indonesian local governments: Women's participation as a moderator. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 6(2), 295-306. <https://doi.org/10.35912/rambis.v5i4.6683>
- Wibisono, N., Purnomo, H., & Rahaju, E. E. (2021). Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA terhadap Belanja Bantuan Sosial pada pemerintah daerah se-Bakorwil Madiun. *JAMER*, 2(1), 6-11. <https://doi.org/10.33319/jamer.v2i1.44>
- Zheng, M., Li, X., Qin, Z., & Sohail, M. T. (2023). Examining the impact of fiscal resources on anti-poverty expenditure: Evidence from China. *Sustainability*, 15(5), 4371. <https://doi.org/10.3390/su15054371>